

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Tingginya harapan masyarakat akan terwujudnya *good corporate governance* dan penyelenggaraan organisasi sektor publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme membutuhkan peningkatan peran dari pengawasan internal. Dalam penyelenggaraanya *good governance* tidak hanya ditujukan bagi pemerintah pusat namun pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan *good governance* agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di setiap lini pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang cukup handal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah bertujuan menjamin agar semua sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah telah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan azas akuntabilitas dan transparansi. Untuk kepentingan itu, maka daerah membentuk satuan pengawas internal yang diwadahi dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kemudian dikenal dengan Inspektorat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dapat berfungsi sebagai auditor atau

pemeriksa internal untuk Pemerintah Provinsi. Sebagai auditor internal pemerintah, BPK mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 3 (tiga) hal. Pertama, pengawasan yang dapat berupa pencegahan terhadap suatu kesalahan pelaporan dan pertanggungjawaban, pencegahan terhadap suatu kelalaian pegawai daerah dalam melakukan suatu sistem dan prosedur, pencegahan terhadap suatu kesalahan dalam penggunaan wewenang yang telah dilaksanakan oleh pejabat SKPD serta mencegah penggelapan ataupun korupsi yang terjadi di daerah. Kedua, pemeriksaan yaitu suatu proses sistematis untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan suatu transaksi yang sudah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan fungsi pemeriksaan, suatu BPK harus dapat menemukan semua kesalahan yang material yang terjadi dalam suatu pengelolaan keuangan daerah, baik kesalahan dalam penyajian angka ataupun kesalahan akibat pelanggaran prosedur-prosedur tertentu dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Ketiga, pembinaan yang merupakan petunjuk teknis tentang suatu pengelolaan keuangan yang tepat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku sesuai dengan azas akuntabilitas dan transparansi. Sehingga peranan internal auditor sangat diperlukan guna mencapai suatu tujuan perusahaan (Sujana,2012:2-3) dalam Wandita, Gede dan Nyoman (2014).

Suatu pemeriksaan (audit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang telah memiliki kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah sudah sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Audit pemerintahan adalah salah satu elemen penting untuk penegakan *good government*. Namun, praktiknya tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, yaitu tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar untuk pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi suatu perdebatan (Mardiasmo, 2005) dalam Wandita, Gede Adi dan Nyoman (2014).

Kualitas penyelenggaraan audit sering mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, yaitu standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor agar mempunyai suatu keahlian dan pelatihan teknis yang cukup untuk melakukan prosedur audit. Standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur tentang auditor dalam pengumpulan data dan kegiatan lain yang dilakukan selama melakukan audit dan mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang telah diaudit secara keseluruhan (IAI, Standar Profesional Akuntan Publik, 2001).

Selain ketiga standar audit tersebut, untuk mencapai audit yang berkualitas dibutuhkan juga pengalaman kerja, kompetensi, independensi, motivasi dan etika yang tinggi. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan

peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Asih, 2006) dalam Lestari, Desak dan Edy (2015). Menurut Tubbs dalam Mayangsari (2003) dalam Lestari, Desak dan Edy (2015). Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal: (1) mendeteksi kesalahan, (2) memahami kesalahan secara akurat, (3) mencari penyebab kesalahan.

Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (SPAP, 2011;150:1).

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki oleh auditor, ia akan kehilangan sikap tidak

memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Rosnidah 2012 mengatakan motivasi seorang auditor mencerminkan gairah kerja para auditor. Motivasi dalam pekerjaan auditor salah satunya dapat meningkat disebabkan karena kondisi atau keadaan lingkungan sekitar tempat mereka bekerja. Jika lingkungan kerja auditor mempunyai tuntutan hukum yang tinggi, maka auditor akan cenderung bekerja lebih teliti dan berhati-hati sehingga hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan hasil audit yang diterbitkan. Auditor pada Negara dengan tuntutan hukum yang kuat akan mendorong para auditor untuk senantiasa meningkatkan kualitas auditnya, namun auditor pada negara dengan tuntutan hukum yang lemah (tidak terlalu berisiko) akan membuat auditor cenderung menurunkan kualitas auditnya.

Secara umum etika didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu (Sukanto, 1991 : 1 dalam Suraida, 2005) dalam Queena dan Abdul (2012). Etika pada dasarnya berkaitan erat dengan moral yang merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan aturan dan ketetapan baik lisan maupun tertulis. Etika yang dinyatakan secara tertulis atau formal disebut sebagai kode etik. Auditor dalam menjalankan praktik profesinya harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI, INDEPENDENSI, MOTIVASI, DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR BPK PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit
2. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit
3. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit
4. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kualitas audit
5. Menganalisis pengaruh etika terhadap kualitas audit

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang *auditing*, dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, independensi, motivasi, dan etika auditor terhadap kualitas audit pada kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan dan Auditor**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memahami variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan sehingga hasil laporan audit dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### **b. Bagi peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui pengaruh yang mempengaruhi kualitas audit.

#### **c. Bagi penelitian selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang perinciannya sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah tinjauan pustaka yang memaparkan penelitian dan landasan teori dalam melakukan penelitian. Bab ini berisi definisi auditing, definisi variable (Pengalaman Kerja, Kompetensi, Independensi, Motivasi, Etika dan Kualitas Audit). Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis.

Bab tiga adalah metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable, metode analisis data, uji hipotesis.

Bab empat adalah bab yang membahas hasil dan pembahasannya berisi analisis data dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum Badan Pemeriksaan Keuangan, deskripsi responden, hasil analisis data dan pembahasannya.

Bab lima adalah penutup yang berisi tentang simpulan, saran-saran atau masukan yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang terkait.